

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, [Indonesia](#) terletak di 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur) dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.



Sumber: google.com

Gambar 4.1

Peta Negara Indonesia

Berdasarkan posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
2. Selatan : Negara Australia dan Samudra Hindia
3. Barat : Samudra Hindia
4. Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.913.578,68 km² dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504. Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Merauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Merupakan sebuah Negara yang memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT.

Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Adapun 34 provinsi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
2. Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
3. Kepulauan Bangka Belitung terdiri Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

5. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
6. Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
7. Pulau Sulawesi terdiri Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
8. Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
9. Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

B. Demografi

Penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261.890,9 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2016 sebesar 1,36 persen per tahun atau turun dari penghitungan pertumbuhan tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 34,51 juta jiwa penduduk dalam kurun waktu 20 tahun (2010-2030). Angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2016 adalah 70,9 tahun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 70,1 tahun. Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 134 orang per km², meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 132 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 15.328 penduduk per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi di Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua yang masing-masing memiliki kepadatan penduduk hanya sebesar 9 penduduk per km², 9 penduduk per km², dan 10 penduduk per km² .

C. Statistik Deskriptif Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengobservasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Angkatan Kerja terhadap kemiskinan periode 2011-2016. Obyek penelitian ini adalah 30 provinsi di Indonesia.

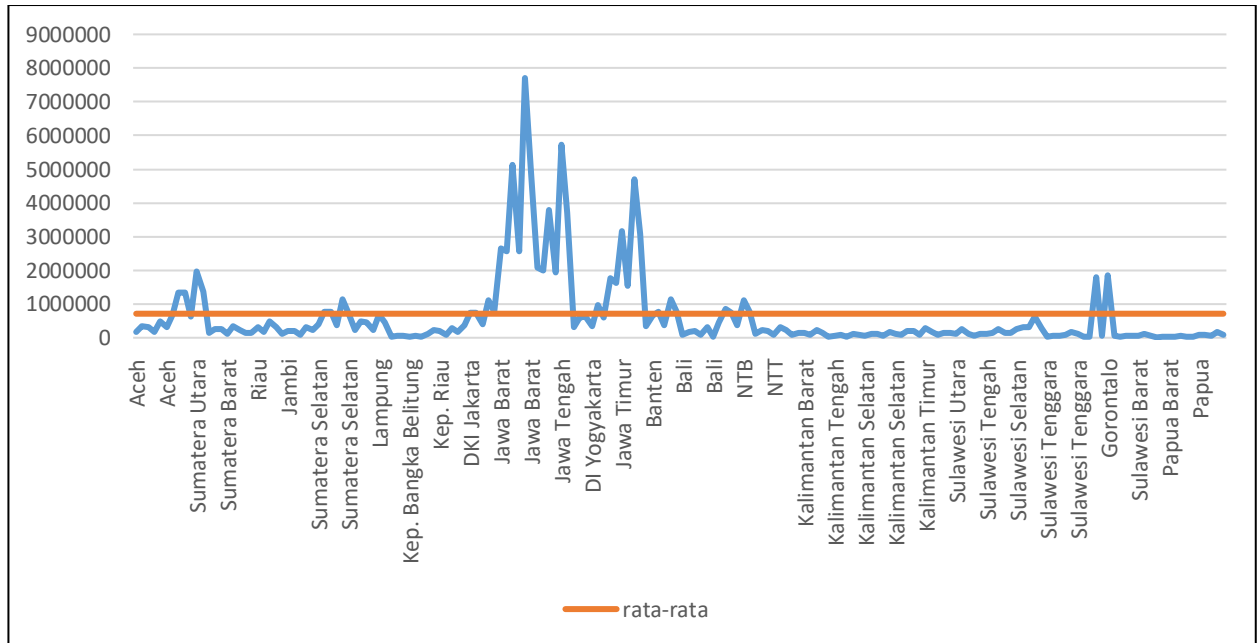
Analisis deskriptif statistik yaitu analisis yang dilakukan untuk menunjukkan gambaran statistik variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian seperti, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Penelitian ini akan menganalisis variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, dan angkatan kerja dengan menggunakan analisis deskriptif statistik. Pengukuran analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Ms. Excel*. Berikut hasil uji statistik terhadap variabel dependen dan independen:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel

	Jumlah Penduduk Miskin	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	PDRB	Angkatan Kerja
Mean	625044,6	724135,4	276528192,5	3970482
Median	215000	233974	115727547	2126849
Maximum	7705000	18899198	1539376654	21075899
Minimum	10000	18158	16669090	355011
Std. Dev.	1116373,7	2503778	359922900,4	5364265

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2011-2016 sebesar 625044,6.



Sumber: Lampiran, data diolah

Gambar 4.1

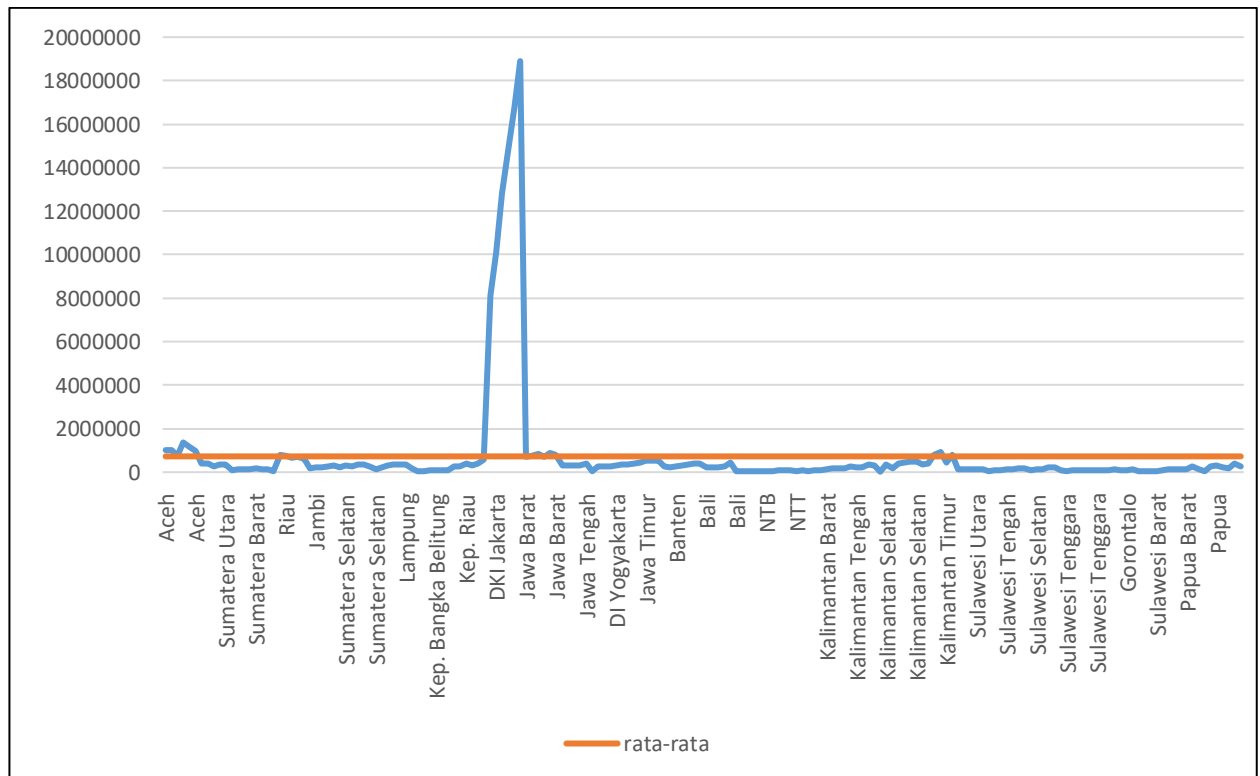
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2011-2016 (ribu jiwa)

Berdasarkan gambar 4.1 nilai tertinggi pada variabel Jumlah Penduduk Miskin adalah Provinsi Jawa Barat sejumlah 7.705.000 ribu jiwa pada tahun 2015. Secara umum Jumlah Penduduk Miskin pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat mengalami naik dan turun, namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2014 sejumlah 2.578.000 ribu jiwa meningkat menjadi 7.705.000 ribu jiwa.

Berdasarkan gambar 4.1 yang memiliki variabel jumlah penduduk miskin di atas rata-rata juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Secara umum Jumlah Penduduk Miskin pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah penurunan, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5.127.000 ribu jiwa dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Selain Jawa Barat dan Jawa Tengah, ternyata masih ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.707.000 ribu jiwa, Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 229.600 ribu jiwa, Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 974.000 ribu jiwa, Provinsi NTB dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.125.000 ribu jiwa, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.975.000 ribu jiwa, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.127.000 ribu jiwa pada tahun 2015. Beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di atas rata-rata mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2015 hal ini dikarenakan dalam kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, inflasi periode September 2014 ke Maret 2015 melonjak tinggi, sebesar 4,03 persen, dengan laju inflasi pedesaan periode September 2014-Maret 2015 sebesar 4,4 persen, begitu juga dengan harga beras pada periode tersebut yang mengalami peningkatan 14,48 persen menjadi Rp 13.089 per kilogram pada Maret 2015. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2015 juga melemah 1,34 persen dibanding September 2014. Secara umum di 30 Provinsi Indonesia jumlah penduduk miskin mengalami perubahan.

Namun pada tahun 2015 hampir di seluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Nilai terendah jumlah penduduk miskin adalah Provinsi Papua Barat sejumlah 10.000 ribu jiwa pada tahun 2011. Selain Provinsi Papua Barat, provinsi Papua dan Kepulauan Bngka Belitung memiliki jumlah penduduk miskin yang terendah dari yang lain.



Sumber: Lampiran, data diolah

Gambar 4.2

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Indonesia Periode
2011-2016 (juta rupiah)

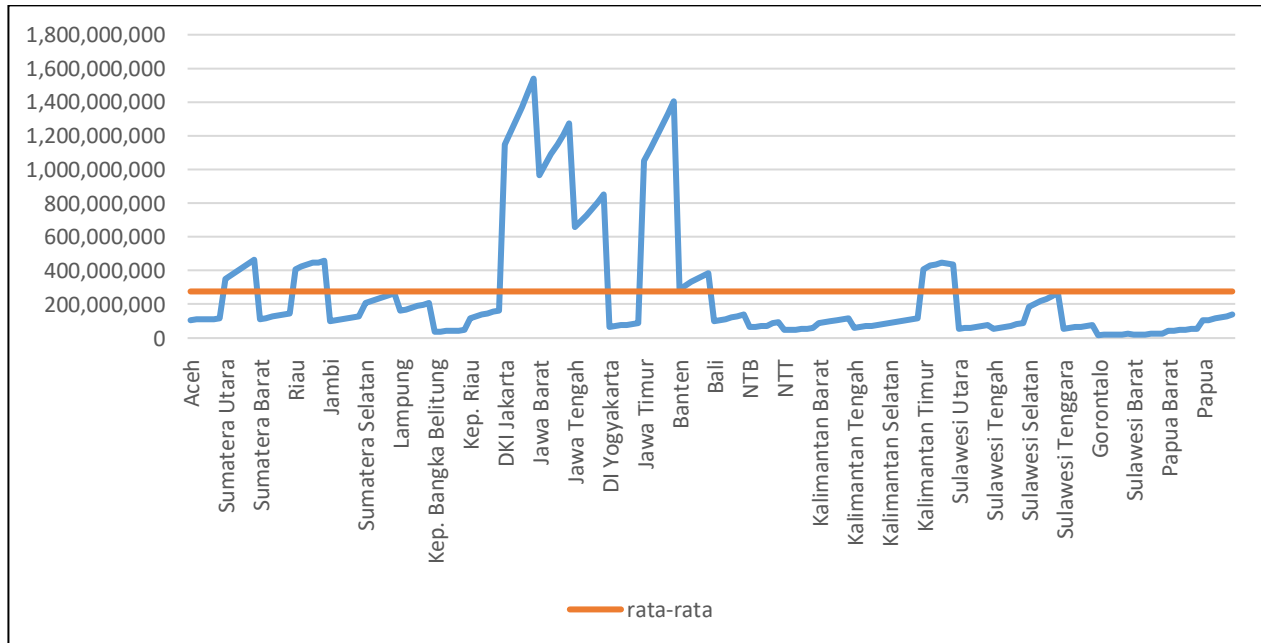
Pada tabel 4.1 nilai rata-rata Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Indonesia periode 2011-2016 sebesar 724135,4. Pada gambar 4.2 terlihat bahwa

nilai tertinggi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 18.899.198 juta rupiah dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2011 hingga dengan 2012 meningkat, namun pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan, dan pada tahun 2015 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan kembali mengalami peningkatan.

Berdasarkan gambar 4.2 yang memiliki variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Secara umum Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2013 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan, dan pada tahun 2015 kembali meningkat. Selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, pengeluaran pemerintah tertinggi di atas rata-rata hanya dimiliki oleh Provinsi Aceh dengan jumlah anggaran sebesar 1.373.638 juta rupiah pada tahun 2015. Dari tahun 2011 hingga pada tahun 2013 anggaran mengalami penurunan, pada tahun 2015 mulai mengalami peningkatan kembali, dan pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan.

Nilai terendah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang ditunjukkan pada gambar 4.2 sebesar 18.158 juta rupiah yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Selain Kalimantan Tengah anggaran terendah juga dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan

Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Provinsi-provinsi yang lain memiliki anggaran di bawah rata-rata.



Sumber: Lampiran, data diolah

Gambar 4.3

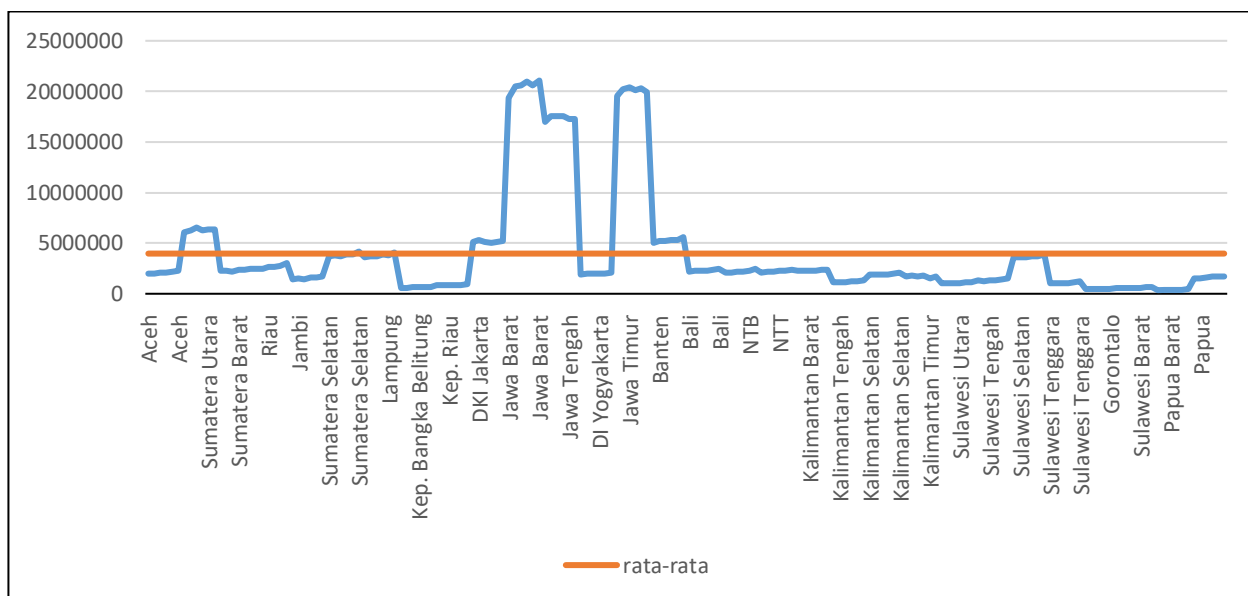
Perkembangan PDRB di Indonesia Periode 2011-2016 (juta rupiah)

Pada tabel 4.1 nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia periode 2011-2016 sebesar 276528192,5. Pada gambar 4.3 terlihat bahwa nilai tertinggi PDRB sebesar 1.539.376.654 juta rupiah dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. PDRB di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2011 hingga dengan 2015 selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan gambar 4.3 yang memiliki variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 1.405.236.111 juta rupiah pada tahun 2016. Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Sejak

tahun 2011 hingga tahun 2016 PDRB di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya PDRB tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 1.275.546.477 juta rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2011 hingga pada 2015 PDRB Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan. Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa timur, PDRB tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, secara umum mengalami peningkatan PDRB setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa PDRB turun disebabkan oleh menurunnya harga-harga komoditi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tinggi dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan.

Nilai terendah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 16.669.090 juta rupiah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo pada tahun 2011. Pada tahun 2011 hingga pada tahun 2013 PDRB selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 kembali mengalami peningkatan. Selain Provinsi Gorontalo, PDRB terendah juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat anggaran sebesar 16.669.090 juta rupiah pada tahun 2011. Dan provinsi yang lainnya memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bawah rata-rata, yang secara umum mengalami perubahan setiap tahunnya.



Sumber: Lampiran, data diolah

Gambar 4.4

Perkembangan Angkatan Kerja di Indonesia Periode 2011-2016 (juta orang)

Pada tabel 4.1 nilai rata-rata angkatan kerja di Indonesia periode 2011-2016 sebesar 3.970.482. Pada gambar 4.4 terlihat bahwa nilai tertinggi angkatan kerja sebesar 21.075.899 juta orang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 hingga dengan 2014 selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sejumlah 419.783 juta jiwa.

Berdasarkan gambar 4.4 yang memiliki variabel angkatan kerja tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Secara umum angkatan kerja pada setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sejumlah 124.683 ribu orang dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 320.835 ribu orang. Selain Jawa Barat dan

Jawa Timur angkatan kerja tertinggi juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten.

Nilai terendah angkatan kerja sebesar 355.011 juta orang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat pada tahun 2011. Selain Provinsi Papua Barat angkatan terendah juga dimiliki oleh Provinsi Gorontalo.